

PENGADILAN AGAMA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024



Jl. Ring Road Barat No. 1

Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ring road Barat No.1 Madiun

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

Madiun - Jawa Timur 63125

e-mail : keseekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 30 juni 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel..

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Madiun. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Madiun, 1 juli 2024
Sekretaris

[Signature]

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
NERACA.....	xiv
LAPORAN OPERASIONAL	xv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	2
A. PENJELASAN UMUM.....	2
A.1 Dasar Hukum	2
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun.....	3
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
A.4 Basis Akuntansi	5
A.5 Dasar Pengukuran.....	5
A.6 Kebijakan Akuntansi.....	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	12
B.2 Belanja Pegawai.....	14
B.3 Belanja Barang.....	15
B.4 Belanja Modal	15
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	16
B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	18
C.2 Persediaan	19
C.3 Tanah	21
C.4 Peralatan dan Mesin.....	21
C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	21

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.....	21
C.6 Gedung dan Bangunan	22
C.7Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan	22
C.8 Aset Tetap Lainnya	22
C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	22
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22
C.16 Aset Tak Berwujud.....	24
C.17 Aset Lain-Lain.....	24
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	24
C.14 Uang Muka dari KPPN	26
C.15 Ekuitas	26
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	26
D.2 Beban Pegawai	27
D.3 Beban Persediaan	27
D.4 Beban Barang dan Jasa	27
D.5 Beban Pemeliharaan	27
D.6 Beban Perjalanan Dinas	28
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	28
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	28
D.9 Kegiatan Non Operasional	28
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
E.1 Ekuitas Awal.....	28
E.2 Surplus (Defisit) LO	29
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	29
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset	29
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan	29
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	29
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	30
E.3.6 Koreksi Lain-lain.....	30
E.4 Transaksi Antar Entitas	30
E.5 Ekuitas Akhir	30

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....30

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI31

F.3 Rekening Pemerintah31

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain.....31

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan..... 13

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja..... 13

Tabel 3.Perbandingan Rincian Realisasi Belanja..... 14

Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai 15

Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang..... 15

Tabel 6.Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal 16

Tabel 7.Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 16

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 17

Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun 18

Tabel 10.Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun..... 19

Tabel 11.Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun..... 20

Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN..... 21

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... 23

Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun..... 23

Tabel 16.Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun 25

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 30 juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 1 juli 2024
Sekretaris Pengadilan Agama Madiun

ONIS NUK ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005



RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.032.000,00 atau mencapai 990,85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 360.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 30 juni 2024 adalah sebesar Rp 2.417.351.717,00 atau mencapai 65,18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.708.705.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada 30 juni 2024.

Nilai Aset per 30 juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 14.149.518.295,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 15.821.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 14.133.697.295,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 235.937.372,00 dan Rp 13.913.580.923,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 juni 2024 adalah sebesar Rp 7.577.041,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 2.896.473.763,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 2.888.896.722,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 2.888.896.722,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 14.388.157.928,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 2.888.896.722,00), kemudian ditambah dengan Kenaikan atau Penurunan Ekuitas dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp (474.577.005),00, dan Rp 2.414.319.717,00, sehingga Ekuitas entitas pada 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 13.913.580.923,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan Basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	306.000,00	3.032.000,00	990,85	209.000,00
Jumlah Pendapatan		306.000,00	3.032.000,00	990,85	209.000,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2.069.072.000,00	1.412.106.165,00	68,25	2.127.452.454,00
Belanja Barang	B.3	1.639.633.000,00	1.005.245.552,00	61,31	1.051.200.744,00
Belanja Modal	B.4	-	-	-	1.076.251.710,00
Jumlah Belanja		3.708.705.000,00	2.417.351.717,00	65,18	4.254.904.908,00

NERACA

PENGADILAN AGAMA MADIUN
NERACA
PER 30 juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	14.400.000,00	-
Belanja Dibayar Dimuka	C. 2	-	1.004.152,00
Piutang Bukan Pajak	C. 3	35.000,00	-
Persediaan	C. 4	1.386.000,00	2.462.500,00
Persediaan yang belum diregister	C. 5	-	-
Jumlah Aset Lancar		15.821.000,00	3.466.652,00
ASET TETAP			
Tanah	C. 5	7.858.355.000,00	7.858.355.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 6	3.082.559.743,00	3.082.559.743,00
Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	C. 7	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 8	7.015.884.944,00	7.015.884.944,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 10	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 11	89.666.809,00	89.666.809,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	(3.912.769.201,00)	(3.657.155.977,00)
Jumlah Aset Tetap		14.133.697.295,00	14.389.310.519,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C. 14	-	-
Aset Lain-Lain	C. 15	-	12.445.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 16	-	(12.445.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		14.149.518.295,00	14.392.777.171,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 17	221.537.372,00	109.202,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 18	-	4.510.041,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 19	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 20	14.400.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		235.937.372,00	4.619.243,00
Jumlah Kewajiban		235.937.372,00	4.619.243,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	13.913.580.923,00	14.388.157.928,00
Jumlah Ekuitas		13.913.580.923,00	14.388.157.928,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.149.518.295,00	14.392.777.171,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA MADIUN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE 30 juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	7.577.041,00	1.148.462,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		7.577.041,00	1.148.462,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 2	1.576.506.537,00	1.176.166.333,00
Beban Persediaan	D. 3	15.504.000,00	13.271.500,00
Beban Barang dan Jasa	D. 4	630.982.707,00	691.390.393,00
Beban Pemeliharaan	D. 5	375.107.300,00	397.049.766,00
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	42.759.995,00	41.340.000,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D. 7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	255.613.224,00	275.116.890,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.896.473.763,00	2.594.334.882,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(288.896.722,00)	(2.593.186.420,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 10	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D. 11	(2.888.896.722,00)	2.593.186.420,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(2.888.896.722,00)	2.593.186.420,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 30 juni 2024 DAN 2023

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E. 1	14.388.157.928,00	14.766.820.727,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E. 2	(2.888.896.722,00)	(2.593.186.420,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 2.1	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E. 3	-	5.676.104,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 3.5	-	-
Lain-Lain	E. 3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 4	2.414.319.717,00	2.144.612.204,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 5	(474.577.005,00)	(442.898.112,00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	13.913.580.923,00	14.323.922.615,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagian Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Madiun

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun

Rencana Strategis Pengadilan Agama Madiun

Visi dan Misi Pengadilan Agama Madiun

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut :
"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Penjelasan :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian Visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar Misi yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Madiun sebagai Visi dan Misinya.

Tujuan

Pengadilan Agama Madiun bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Agama Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- g. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengadilan Agama Madiun

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2020 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan

- menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- 6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
 - 7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

<i>Pendekatan</i>	A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
<i>Penyusunan</i>	Laporan Keuangan 30 juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Madiun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
<i>Laporan</i>	
<i>Keuangan</i>	

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

<i>Basis</i>	A.4 Basis Akuntansi
<i>Akuntansi</i>	Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis AkruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

<i>Dasar</i>	A.5 Dasar Pengukuran
<i>Pengukuran</i>	Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Persekot Gaji.
 - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya Konsumsi Aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset

Aset Lancar

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Tahun 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada 30 juni 2024 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih Agama dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Kewajiban	(6) Kewajiban • Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
-----------	--

Ekuitas	(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
---------	---

Realisasi	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan	B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Negara Bukan Pajak Rp 3.032.000,00	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 juni 2024 adalah sebesar Rp 3.032.000,00 atau mencapai 990,85 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 360.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Madiun per 30 juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	TA 2024				
		Anggaran	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	0,00%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-	0,00%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.000	3.032.000	-	3.032.000	990,85%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai	-	-	-	-	0,00%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	-	0,00%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	0,00%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	0,00%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	0,00%

Realisasi

Belanja

Negara Rp.

2.417.351.717,00

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Madiun per 30 juni 2024 adalah sebesar Rp 2.417.351.717,00 atau 65,18 persen dari Anggaran Belanja sebesar Rp 3.708.705.000,00.

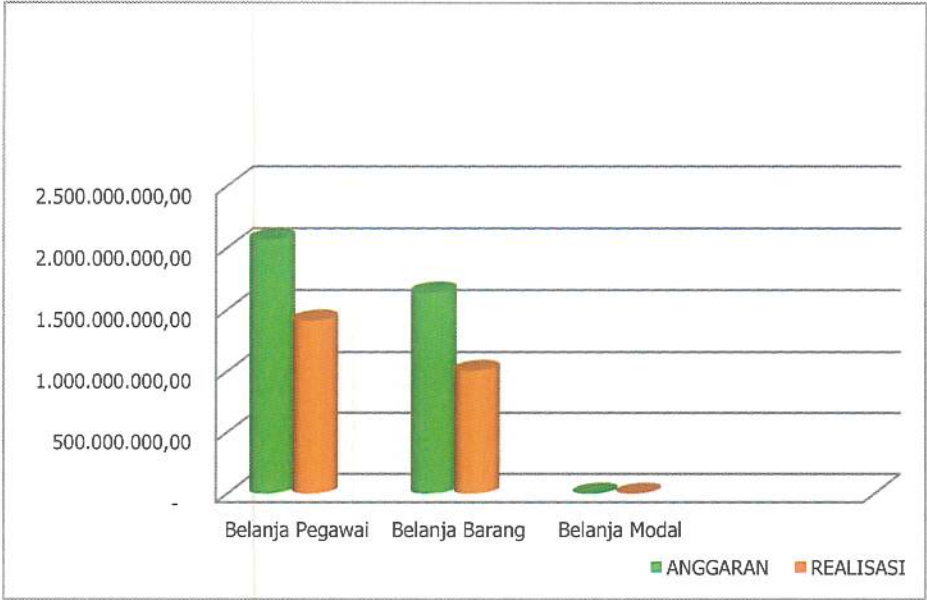
Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Pengadilan Agama Madiun per 30 juni 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024				
	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.069.072.000,00	1.412.106.730,00	565,00	1.412.106.165,00	68,25
Belanja Barang	1.639.633.000,00	1.005.245.552,00	-	1.005.245.552,00	61,31
Belanja Modal	-	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja	3.708.705.000,00	2.417.352.282,00	565,00	2.417.351.717,00	65,18

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 juni 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja per 30 juni 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp 733.793.748,00 atau sebesar 15,67 persen dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh Menurunnya Anggaran belanja modal pada tahun ini sehingga menyebabkan realisasi menurun disbanding tahun lalu.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja per 30 juni 2024 dan Tahunan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Pegawai	1.412.106.165,00	1.051.200.744,00	360.905.421,00	34,33
Belanja Barang	1.005.245.552,00	1.076.251.710,00	(71.006.158,00)	(6,60)
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	2.417.351.717,00	2.127.452.454,00	289.899.263,00	13,63

Realisasi
Belanja
Pegawai Rp
1.412.106.165
,00

B.2 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.412.106.165,00 dan Rp 1.051.200.744,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 360.905.421,00 atau 34,33 persen. Kenaikan dikarenakan adanya pejabat negara dan pegawai yang baru.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai per 30 juni 2024 dan Tahunan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.412.106.730,00	1.051.200.744,00	360.905.986,00	34,33
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	1.412.106.730,00	1.051.200.744,00	360.905.986,00	34,33
Pengembalian Belanja	565,00	-	565,00	100,00
Realisasi Belanja Neto	1.412.106.165,00	1.051.200.744,00	360.905.421,00	34,33

Realisasi
Belanja
Barang Rp
1.005.245.552
,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.005.245.552,00 dan Rp 1.076.251.710,00. Realisasi Belanja Barang per 30 juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 71.006.158,00 atau 6,60 persen dari Realisasi Belanja Barang per Tahun 2023. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya Belanja Pemeliharaan dan belanja barang oprasional Pada Tahun 2024 dibanding tahun 2023. Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang per 30 juni 2024 dan Tahunan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	484.073.000,00	538.450.044,00	(54.377.044,00)	(10,10)
Belanja Barang Non Operasional	-	8.888.880,00	(8.888.880,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	23.529.800,00	22.155.300,00	1.374.500,00	6,20
Belanja Jasa	88.877.757,00	77.940.520,00	10.937.237,00	14,03
Belanja Pemeliharaan	366.005.000,00	387.476.966,00	(21.471.966,00)	(5,54)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	42.759.995,00	41.340.000,00	1.419.995,00	3,43
Realisasi Belanja Bruto	1.005.245.552,00	1.076.251.710,00	(71.006.158,00)	(6,60)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	1.005.245.552,00	1.076.251.710,00	(71.006.158,00)	(6,60)

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi

Belanja Modal per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Realisasi Belanja Modal per 30 juni 2024 tidak mengalami penurunan ataupun Kenaikan . Hal ini antara lain disebabkan oleh Tidak adanya Anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dan 2023.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal per 30 juni 2024 dan Tahunan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	0,00

Realisasi
Belanja
Modal
Peralatan dan
Mesin Rp 0,00

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 juni 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Tahun 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 dan tahun 2023 Anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak ada.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 juni 2024 dan Tahunan 2023 tersebut antara lain:

Tabel 7.Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	-	-	-

Realisasi
Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp 0,00

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 juni 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Tahun 2023.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 tersebut antara lain:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 juni 2024 dan 30 juni Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 15.821.000,00 dan Rp 3.466.652,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 12.354.348,00 atau 356,38 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

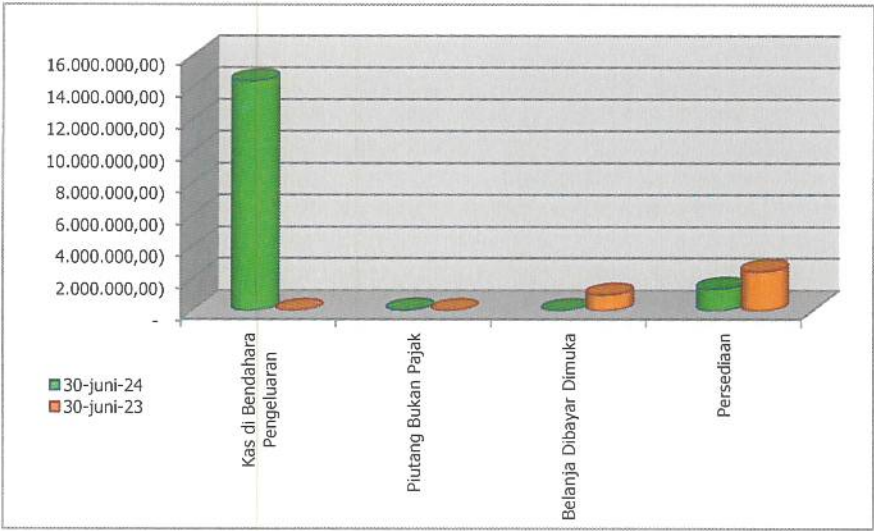
Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.400.000,00	-	14.400.000,00
2	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	1.004.152,00	(1.004.152,00)
3	Piutang Bukan Pajak	35.000,00	-	35.000,00
5	Persediaan	1.386.000,00	2.462.500,00	(1.076.500,00)
Jumlah Aset Lancar		15.821.000,00	3.466.652,00	12.354.348,00

Komposisi Aset Lancar per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik
Komposisi Aset Lancar



Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp
14.400.000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Madiun per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 14.400.000,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan di tahun anggaran 2024.

Persediaan Rp
1.386.000,00

C.2 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.386.000,00 dan Rp 2.462.500,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.076.500,00 atau 43,72 persen.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 per akun adalah sebagai berikut :

Tabel 10.Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	117111	Barang Konsumsi	1.386.000,00	2.462.500,00
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	117911	Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah			1.386.000,00	2.462.500,00

Aset Tetap Rp
14.133.697.29
5,00

Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah sebesar Rp 14.133.697.295,00 dan Rp 14.389.310.519,00, terjadi penurunan sebesar Rp 255.613.224,00 atau 1,78 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

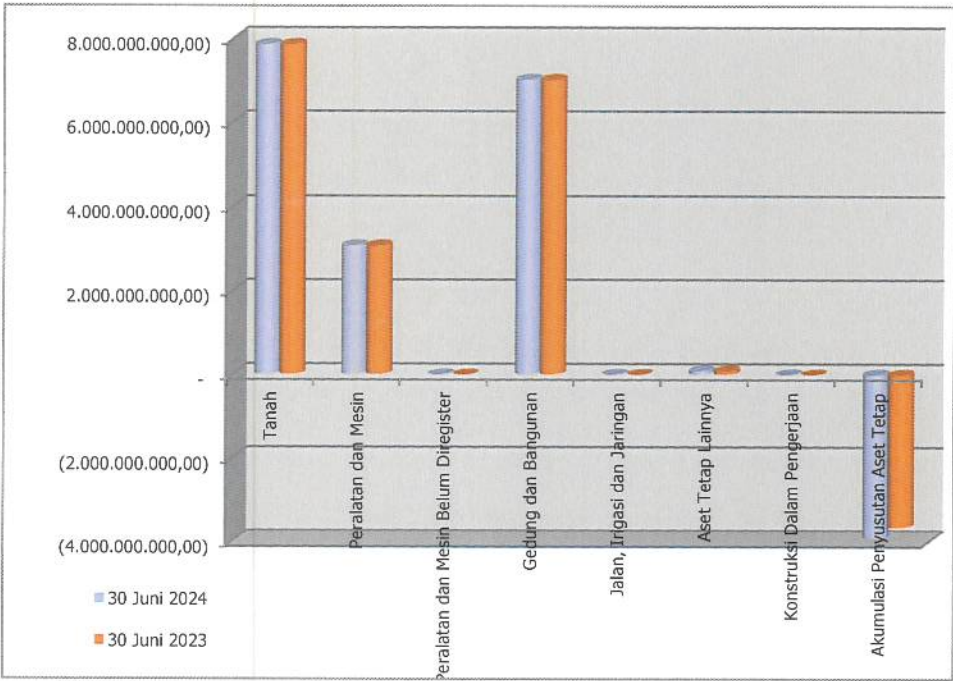
Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	7.858.355.000,00	7.858.355.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	3.082.559.743,00	3.082.559.743,00	-
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	7.015.884.944,00	7.015.884.944,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	89.666.809,00	89.666.809,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	18.046.466.496,00	18.046.466.496,00	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.912.769.201,00)	(3.657.155.977,00)	(255.613.224,00)
	Jumlah Aset Tetap	14.133.697.295,00	14.389.310.519,00	(255.613.224,00)

Komposisi Aset Tetap per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik
Komposisi Aset Tetap



Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAK BMN per 30 juni 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca SAIBA	Aset Tetap dalam Neraca SIMAKBMN	Selisih
1	Tanah	7.858.355.000,00	7.858.355.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	3.082.559.743,00	3.082.559.743,00	-
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	7.015.884.944,00	7.015.884.944,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	89.666.809,00	89.666.809,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.912.769.201,00)	(3.657.155.977,00)	(255.613.224,00)
Jumlah		14.133.697.295,00	14.389.310.519,00	(255.613.224,00)

Tanah Rp
7.858.355.000,
00

C.3 Tanah
Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia di Wilayah Jawa Timur per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7.858.355.000,00 dan Rp 7.858.355.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan pada aset tanah.
Mutasi transaksi Tanah pada Tahunan 30 juni 2024 tersebut dapat dijelaskan dan telah disajikan pada Calk BMN

Peralatan dan
Mesin Rp
3.082.559.743,
00

C.4 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.082.559.743,00 dan Rp 3.082.559.743,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen.
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan in.

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0,00

C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan ataupun Penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 0,00 atau 0 persen, terdapat pada :
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

<i>Gedung dan Bangunan Rp 7.015.884.944,00</i>	C.6 Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah Rp 7.015.884.944,00 dan Rp 7.015.884.944,00, Tidak mengalami kenaikan ataupun Penurunan dari tahun 2023. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00</i>	C.7Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan
<i>Aset Tetap Lainnya Rp 89.666.809,00</i>	C.8 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalahRp 89.666.809,00 dan Rp 89.666.809,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00</i>	C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Pembangunan dengan KDP sudah selesai dan dijadikan asset definitif. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 3.912.769.201,00</i>	C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.912.769.201,00 dan Rp 3.657.155.977,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 255.613.224,00 atau 6,99 persen.

RincianSaldo AkumulasiPenyusutanAsetTetapper 30 juni 2024 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	7.858.355.000,00		7.858.355.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.082.559.743,00	(2.099.275.537,00)	983.284.206,00
3	Gedung dan Bangunan	7.015.884.944,00	(1.299.110.969,00)	5.716.773.975,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	89.666.809,00	-	89.666.809,00
Jumlah		18.046.466.496,00	(3.398.386.506,00)	14.648.079.990,00

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp 0,00

Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalahRp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

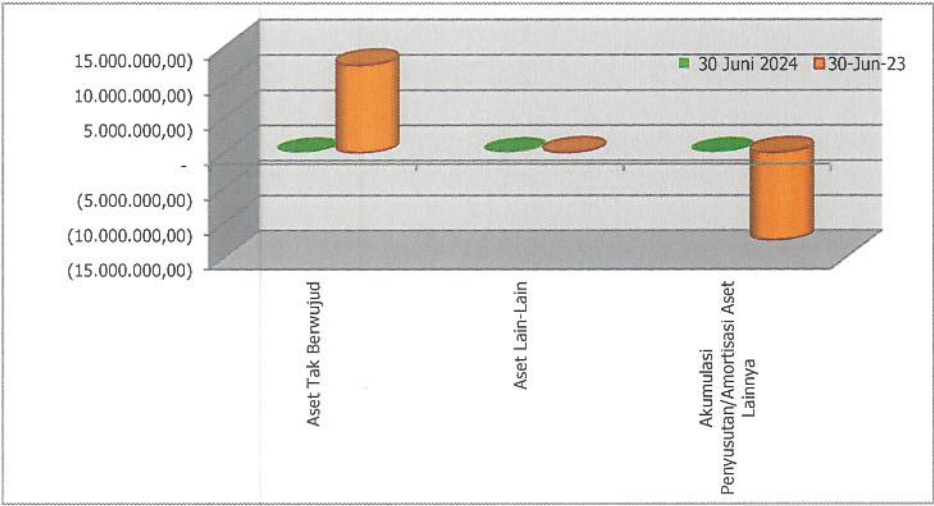
Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Kenaikan /Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	-	12.445.000,00	(12.445.000,00)
2	Aset Lain-Lain	-	-	0
Jumlah		-	12.445.000,00	(12.445.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-	(12.445.000,00)	12.445.000
Jumlah Aset Lainnya		0	0	0

Komposisi Aset Lainnya per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik
Komposisi Aset Lainnya



Aset Tak
Berwujud Rp
0,00

C.16 Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan lisensi.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah Rp 0,00 dan Rp 12.445.000,00, terjadi penurunan.
Rincian Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp
89.666.809,00

C.17 Aset Lain–Lain
Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah Rp 89.666.809,00 dan Rp 89.666.809,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.
Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per 30 juni 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan

dan Amortisasi Aset Lainnya berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rp (0,00) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (12.445.000,00), terjadi kenaikan maupun. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Kewajiban **KEWAJIBAN**

Jangka Pendek **Kewajiban Jangka Pendek**

Rp Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

235.937.372,0 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 tersaji sebesar Rp 235.937.372,00 dan Rp 4.619.243,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 231.318.129 atau 5.007,71 persen.

0 Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

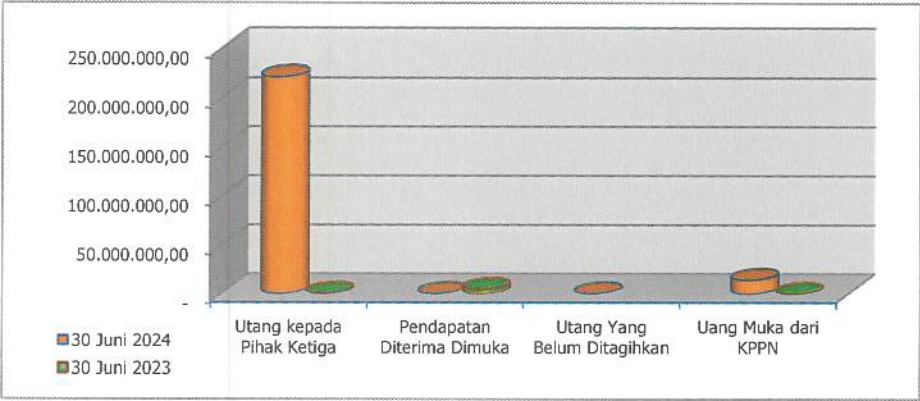
Tabel 15.Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Kenaikan /Penurunan
1	Utang kepada Pihak Ketiga	221.537.372,00	109.202,00	221.428.170,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	4.510.041,00	(4.510.041,00)
3	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-
3	Uang Muka dari KPPN	14.400.000,00	-	14.400.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		235.937.372,00	4.619.243,00	231.318.129,00

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 30 juni 2024 dan Tahun 2023 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik
Komposisi Kewajiban Jangka Pendek



Uang Muka
dari KPPN Rp
14.400.000,00

C.14 Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 14.400.000,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan / penurunan pada Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp
13.913.580.92
3,00

EKUITAS
C.15 Ekuitas
Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.
Saldo Ekuitas per 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar Rp 13.913.580.923,00 dan Rp 14.323.922.615,00, terjadi penurunan sebesar Rp 410.341.692,00 atau 2,86persen.

Pendapatan
PNBP Rp
7.577.041,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan 30 juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7.577.041,00 dan Rp 1.148.462,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 6.428.579,00.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

1.576.506.537,00 Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.576.506.537,00 dan Rp 1.176.166.333,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 400.340.204,00 atau 34,03 persen dari tahun 2023.

Beban **D.3 Beban Persediaan**

Persediaan Rp Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

15.504.000,00 Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 15.504.000,00 dan Rp 13.271.500,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.232.500,00 atau 16,82 persen.

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Rp Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

630.982.707,00 Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 630.982.707,00 dan Rp 691.390.393,00. Terjadi penurunan sebesar Rp 60.407.686,00 atau sebesar 8,737 persen dari tahun 2023.

Beban **D.5 Beban Pemeliharaan**

Pemeliharaan Rp Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

375.107.300,00 Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 375.107.300,00 dan Rp

397.049.766,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 21.942.466,00 atau sebesar 5.526 persen dari tahun 2023.

<i>Beban</i>	D.6 Beban Perjalanan Dinas
<i>Perjalanan Dinas Rp</i>	Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.
<i>42.759.995,00</i>	Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 42.759.995,00 dan Rp 41.340.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 1.419.995,00 atau sebesar 3,435 persen dari tahun 2023.

<i>Beban</i>	D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
<i>Penyusutan dan Amortisasi Rp</i>	Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.
<i>255.613.224,00</i>	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 255.613.224,00 dan Rp 275.116.890,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 19.503.666,00 atau sebesar 7.089 persen dari tahun 2023.

<i>Beban</i>	D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00</i>	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

<i>Kegiatan Non Operasional Rp</i>	D.9 Kegiatan Non Operasional
<i>0,00</i>	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing

14.388.157.92 sebesar Rp 14.388.157.928,00 dan Rp 14.766.820.727,00. Terjadi penurunan
8,00 sebesar Rp 378.662.799,00 atau sebesar 4,99 persen dari tahun 2023.

Surplus/Defisit **E.2 Surplus (Defisit) LO**
LO (Rp Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan
2.888.896.722 Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa.
)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan 2023
adalah defisit sebesar (Rp 2.888.896.722,00) dan (Rp 2.593.186.420,00).

Dampak **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan**
Kumulatif **Mendasar**
Perubahan Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Kebijakan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,00
Akuntansi/Kes dan Rp 0,00.
alahan
Mendasar
Rp0,00

Penyesuaian **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**
Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat
Rp0,00 penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan
Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Koreksi Nilai **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**
Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang
Rp0,00 diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode
sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan
Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**
Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan
Tetap Rp 0,00 penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan

	Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.
<i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp 0,00</i>	E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 5.676.104,00. Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp 0,00 merupakan pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.
<i>Koreksi Lain-lain Rp 0,00</i>	E.3.6 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp 2.414.319.717,00</i>	E.4 Transaksi Antar Entitas Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai transaksi Antar Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 juni 2024 dan Tahunan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.414.319.717,00 dan Rp 2.144.612.204,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 269.707.513,00 atau sebesar 12,58 persen dari tahun 2023.
<i>Ekuitas Akhir Rp 13.913.580.923,00</i>	E.5 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 juni 2024 dan Tahunan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 13.913.580.923,00 dan Rp 14.323.922.615,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 410.341.692,00 atau sebesar 2,86 persen dari tahun 2023.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca per 30 juni 2024 pada Pengadilan Agama Madiun.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan 30 juni 2024 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Agama Madiun sampai dengan per 30 juni 2024 sebanyak 1 rekening dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Rekening Bendahara Pengeluaran | :1 rekening |
| 2. Rekening Bendahara Penerimaan | :1 rekening |
| 3. Rekening Lainnya | :1 rekening |
| Jumlah | :3 rekening |

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain

Tidak terdapat pengungkapan penting lainnya.